KONTRAK

Nomor : PROC. 069/TF/00/LPPNPI/PGD.02.02/XII/2019

Antara

PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA (LPPNPI)

Dengan

PT BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

Tentang

PENGADAAN JASA BERLANGGANAN PENAMBAHAN JARINGAN KOMUNIKASI DOMESTIK DI PERUM LPPNPI

Pokok Ikatan Kerja ini, Syarat-Syarat Khusus Ikatan Kerja (SSKIK), Syarat-Syarat Umum Ikatan Kerja (SSUIK) berikut seluruh perubahan, penambahan dan semua lampirannya (selanjutnya disebut "**Kontrak**") dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Kamis tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas (05-12-2019) di Tangerang, oleh dan antara :

I. **NONO SUNARIYADI**, selaku Kepala Divisi Kesiapan Fasilitas Teknik Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, berkantor pusat di Jalan Ir. H. Juanda, Karang Anyar, Neglasari, Tangerang 15121 – Indonesia, yang anggaran dasarnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 77 Tahun 2012, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;

- Untuk selanjutnya disebut **"PERUSAHAAN"**.

II. **ROHADI**, selaku Direktur Utama PT Bintang Komunikasi Utama, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT BINTANG KOMUNIKASI UTAMA,** beralamat di Graha BKU, Jalan Jengki Raya Nomor 43, RT 008/RW 002, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur 13650 - Indonesia, yang anggaran dasarnya tertuang dalam Akta Pendirian Nomor : 01 tanggal 10 Desember 2001 yang dibuat dihadapan H Djoko Oetoro SH, MM, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Nomor : C-16055 HT.01.01. TH 2003 tanggal 11 Juli 2003 dan perubahannya yang terakhir dalam Akta Nomor : 20 tanggal 16 September 2015 yang dibuat dihadapan Jhonni Marihotua Sianturi SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Nomor : AHU-094204.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 17 September 2015;

- Untuk selanjutnya disebut **"PENYEDIA".**

Paraf	Perusahaan	Penyedia

Scanned by CamScanner

PERUSAHAAN dan **PENYEDIA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **"Para Pihak"** dan masing-masing sebagai **"Pihak"**. Para Pihak bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dengan terlebih dahulu memperhatikan dan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

A. Bahwa **PERUSAHAAN** merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang bergerak di bidang jasa layanan navigasi penerbangan, yang dalam pelaksanaan Kontrak ini membutuhkan PENYEDIA untuk melakukan pengulangan sewa ke dua (*Repeat Order* ke dua) jasa berlangganan jaringan komunikasi domestik yang meliputi komunikasi *point to point* antara Kantor Cabang dan Kantor Cabang dengan pesawat udara di wilayah Flight Information Region (FIR) Indonesia (selanjutnya disebut **"Pekerjaan"**). Dalam Pekerjaan ini, terdapat perubahan lingkup jaringan, baik penambahan dan pengurangan koneksitas jaringan yang mengurangi Nilai Kontrak. Nilai Kontrak pada *Repeat Order* pertama sebesar Rp2.439.680.760,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh Rupiah).

B. Bahwa PENYEDIA merupakan suatu Perseroan Terbatas yang dibentuk berdasarkan dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan kepada PERUSAHAAN, memiliki keahlian profesional, personel, sumber daya serta kemampuan teknis manajerial, pengalaman dan izin dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang jasa telekomunikasi, yang menyanggupi dan bersedia memenuhi kebutuhan PERUSAHAAN sebagaimana dimaksud pada butir A di atas melalui mekanisme penunjukan langsung. Oleh karenanya PENYEDIA setuju untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.

C. Para Pihak menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.

D. Para Pihak mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini, masing-masing Pihak :
   1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Konsultan Hukum dan/atau Advokat;
   2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
   3) Telah membaca dan memahami secara seksama terhadap ketentuan Kontrak ini; dan
   4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Para Pihak menyatakan setuju dan sepakat untuk menandatangani Kontrak Pekerjaan dengan mempergunakan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Paraf	Perusahaan	Penyedia

Scanned by CamScanner

POKOK IKATAN KERJA

Pasal 1
Hierarki Dokumen

(1) Dokumen-dokumen berikut ini merupakan acuan pelaksanaan Pekerjaan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada lampiran-lampiran dalam Kontrak ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini, yaitu sebagai berikut:

a. Kontrak beserta perubahannya/*Addendum* (apabila ada);

b. Lampiran Kontrak:

1. Surat Penunjukan Nomor: 11333/TF/00/LPPNPI/PGD.02.03/XII/2019 tanggal 04 Desember 2019;
2. Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung Nomor : BA-1/PL.14/16/11/2019 tanggal 29 November 2019;
3. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan/atau Negosiasi Teknis dan Harga Nomor: : BA-1/PL.14/15/11/2019 tanggal 29 November 2019 beserta lampirannya yang memuat rincian anggaran biaya setelah negosiasi;
4. Dokumen Penawaran dari PIHAK KEDUA atas Pengadaan Jasa Berlangganan Jaringan Komunikasi Domestik di PERUM LPPNPI, yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut **"Dokumen Penawaran"**;
5. Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : BA-1/PL.14/11/11/2019 tanggal 27 November 2019 ;
6. Dokumen Pemilihan Nomor : DOK-1/PL.14/04/11/2019 tanggal 25 November 2019 atas Pekerjaan Pengadaan Jasa Berlangganan Penambahan Jaringan Komunikasi Domestik di Perum LPPNPI, yang memuat Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pelaksanaan Pekerjaan; dan
7. Dokumen-dokumen lainnya, seperti jaminan-jaminan dan/atau dokumen terkait pelaksanaan Kontrak.

Dokumen di atas merupakan acuan pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan apabila ditemukan pertentangan antara ketentuan dalam satu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen lainnya, maka apabila PERUSAHAAN tidak memberikan klarifikasi atau perintah yang diperlukan terhadap pertentangan dimaksud, yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki tersebut di atas, dengan berdasar pada ketentuan dan/atau kebijakan yang berlaku serta ditetapkan.

Dalam hal tidak diatur dalam Kontrak ini, maka Para Pihak sepakat memberlakukan ketentuan yang tercantum dalam peraturan yang berlaku di PERUSAHAAN, petunjuk-petunjuk dan peringatan-peringatan lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh PERUSAHAAN, peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mensukseskan Pekerjaan dan mencapai maksud tujuan dibuatnya Kontrak ini.

(2) Definisi dan Istilah

Setiap definisi, istilah dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam SSUIK dan bagian-bagian lain dalam Kontrak.

Paraf	Perusahaan	Penyedia

Scanned by CamScanner

Pasal 2
PEKERJAAN dan LINGKUP PEKERJAAN

(1) **Pekerjaan**
Nama Pekerjaan dalam Kontrak ini adalah Pengadaan Jasa Berlangganan Penambahan Jaringan Komunikasi Domestik di Perum LPPNPI.

(2) **Lingkup Pekerjaan**
PERUSAHAAN dalam kedudukannya seperti tersebut di atas, menunjuk PENYEDIA sebagaimana PENYEDIA menerima penunjukan tersebut dari PERUSAHAAN untuk melaksanakan Pekerjaan dengan lingkup yaitu pemeliharaan jaringan komunikasi domestik berikut trasponder dan kelengkapan lainya sesuai yang tercantum dalam BoQ (lampiran Kontrak).

(3) **Lokasi Pekerjaan**
Lokasi Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah lokasi pemeliharaan Jaringan yaitu di JATSC, MATSC, Batam, Medan, Kupang, Jayapura, dan Ambon, yang berada di bawah pengelolaan PERUSAHAAN.

Pasal 3
NILAI KONTRAK

(1) Nilai Kontrak telah disepakati oleh Para Pihak yaitu sebesar Rp2.157.959.760,00 (dua milyar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh Rupiah) sudah termasuk PPN, semua bea dan biaya-biaya lainnya.

(2) Kontrak ini merupakan kontrak harga satuan dengan tata cara pembayaran bulanan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah jangka waktu sewa jaringan yaitu selama 12 (dua belas) bulan yaitu sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020.

PASAL 5
LAIN-LAIN

(1) Para Pihak sepakat bahwa seluruh lampiran atas Kontrak ini, berita acara, surat-surat dan seluruh dokumen yang dibuat dan/atau akan dibuat di kemudian hari oleh Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Paraf	Perusahaan	Penyedia

Scanned by CamScanner

(2) Dalam hal terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Kontrak ini yang menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundang-undangan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya Kontrak ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kontrak ini masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak. Para Pihak selanjutnya dapat membuat dan menyetujui ketentuan yang baru, untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut, dengan satu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.

Demikian Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal Kontrak, dengan terlebih dahulu telah dibaca, diteliti dengan seksama serta telah dipahami dan dimengerti oleh Para Pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani di atas meterai cukup yang memiliki kekuatan hukum yang sama.

PENYEDIA	PERUSAHAAN
PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA	METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH
ROHADI	**NONO SUNARIYADI**
Direktur Utama	Kepala Divisi Kesiapan Fasilitas Teknik

Scanned by CamScanner

SYARAT-SYARAT KHUSUS IKATAN KERJA (SSKIK)
NOMOR KONTRAK : PROC.069 /TF/00/LPPNPI/PGD.02.02/XII/2019
TANGGAL : 05 Desember 2019

1. **Korespondensi**	Alamat Para Pihak sebagai berikut: **PERUSAHAAN : PERUM LPPNPI** Jabatan : Kepala Divisi Kesiapan Fasilitas Teknik Alamat : Kantor Pusat Perum LPPNPI Jalan Ir. H. Juanda, Neglasari, Karanganyar, Tangerang – Banten Telepon : 021-55915000 Faksimili : 021- 55915100 Website : www.airnavindonesia.co.id **PENYEDIA : PT Bintang Komunikasi Utama** Jabatan : Direktur Utama Alamat : Jalan Jengki Raya Nomor 43 Kebon Pala, Makasar, Jakarta Timur 13650 - Indonesia Telepon : 021-80878128/129 Faksimili : 021-8087130
2. **Wakil Sah Para Pihak**	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: PERUSAHAAN: a. Pejabat Yang Berwenang : Kepala Divisi Kesiapan Fasilitas Teknik b. PPP c. PPJK **PENYEDIA** : Direktur Utama
3. **Tata Cara Pembayaran**	Pembayaran atas Pekerjaan dibayarkan secara bulanan, yaitu sebesar Rp179.829.980,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh Rupiah) per bulan yang dinyatakan dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan.
4. **Dokumen Pembayaran**	Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran Pekerjaan adalah sebagai berikut : a. Invoice penagihan; b. Kuitansi dilengkapi meterai Rp 6.000,-; c. Faktur Pajak; d. Fotokopi Kontrak ini beserta perubahannya apabila ada;

Paraf	Perusahaan	Penyedia

Scanned by CamScanner

	e. Fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran bulanan; dan f. Fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan dan BAST untuk pembayaran terakhir.
5. **Rekening PENYEDIA**	**Bank : Bank BRI** **Cabang : KCP Jakarta Kramat Jati** **Nomor Rekening : 0 4 4 2 0 1 0 0 1 1 5 5 3 0 1** **Atas Nama : PT Bintang Komunikasi Utama**
6. **Jaminan Layanan**	a. PENYEDIA berkewajiban memberikan Tingkat Layanan (Service Level Guarantee) untuk layanan jaringan komunikasi domestik dan Fasilitas Jaringan di Lokasi Pekerjaan dengan memenuhi minimum *Service Level Guarantee* (SLA) yang telah disepakati bersama yaitu 99,97%. b. PENYEDIA harus mampu memberikan kualitas suara jaringan komunikasi dengan readability scala minimal 4/5 (four-by-five) dan tidak terjadi echo maupun delay. c. PENYEDIA berkewajiban melakukan rapat koordinasi dan evaluasi per 3 (tiga) bulan bersama PPP.
7. **Denda**	PENYEDIA akan dikenakan Denda sebesar: a. 5% (lima perseratus) dari Nilai Kontrak yang dibayarkan per bulan, apabila PENYEDIA gagal memberikan Tingkat Layanan untuk setiap channel (link)/aplikasi sebesar 99,97% per bulan atau akumulasi down time per bulan lebih besar dari 43,187 menit. b. Denda sebagaimana huruf a di atas dan ditambahkan sebesar 1/30 Nilai Pekerjaan yang dibayarkan bulanan, per hari keterlambatan, apabila PENYEDIA tidak melakukan perbaikan dalam waktu 1x24 jam setelah gangguan dilaporkan secara lisan dan/atau tertulis oleh pengguna/PERUSAHAAN kepada PENYEDIA.
8. **Laporan Kemajuan Pekerjaan**	Laporan Kemajuan Pekerjaan berupa Laporan SLA per bulan yang dibuat oleh PENYEDIA dan mendapatkan persetujuan dari PPP.
9. **Pengecualian ketentuan dalam SSUIK**	Butir 36.6 SSUIK tentang Sanksi Denda

Paraf	Perusahaan	Penyedia

Scanned by CamScanner

SYARAT-SYARAT UMUM IKATAN KERJA (SSUIK)
NOMOR KONTRAK : PROC. 069 /TF/00/LPPNPI/PGD.02.02/XII/2019
TANGGAL : 05 Desember 2019

A. Ketentuan Umum	
1. Definisi	Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-syarat Umum Ikatan Kerja ini memiliki arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: 1.1. **Bagian Pekerjaan Yang Disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan Pekerjaan Utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada PENYEDIA lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Yang Berwenang. 1.2. **Berita Acara Perubahan Pekerjaan** adalah berita acara yang ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang dan PENYEDIA yang memuat hasil verifikasi, klarifikasi dan/atau negosiasi teknis dan harga atau Surat Usulan Perubahan Pekerjaan sebagai dasar perubahan Kontrak. 1.3. **BAST** atau **Berita Acara Serah Terima** adalah berita acara untuk Pekerjaan yang tidak memiliki Masa Pemeliharaan, yang ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang atau yang menerima surat kuasa dari Pejabat Yang Berwenang dengan PENYEDIA untuk menyatakan bahwa PENYEDIA telah menyelesaikan kewajiban dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. 1.4. **Dokumen Pemilihan** adalah dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum pemilihan yang menjadi dasar bagi PENYEDIA dalam mengajukan penawaran termasuk didalamnya adalah Dokumen Teknis. 1.5. **Dokumen Penawaran** adalah dokumen-dokumen penawaran yang disampaikan PENYEDIA dalam proses Pengadaan. 1.6. **Hari** adalah hari kalender. 1.7. **Hari Kerja** adalah semua hari kalender dalam satu tahun sesuai *gregorian calender*, tidak termasuk hari sabtu, minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan Pemerintah Indonesia.

Paraf	Perusahaan	Penyedia

Scanned by CamScanner

	1.8. **Harga Satuan** adalah harga satu jenis pekerjaan/barang tertentu, per satuan tertentu. 1.9. **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan** adalah jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak, yang terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan, tidak termasuk Masa Pemeliharaan. 1.10. **KAK/RKST Pengadaan** adalah gambaran umum mengenai Pengadaan yang akan dilaksanakan. 1.11. **Kontrak** adalah perikatan tertulis yang dibuat dan ditandatangani antara Pejabat Yang Berwenang dengan PENYEDIA, yang mencakup termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Ikatan Kerja, SSUIK ini, SSKIK, lampiran-lampiran serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak. 1.12. **Keadaan Kahar** adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi di luar kekuasaan para pihak dalam Kontrak, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak sehingga diperlukan perubahan Kontrak atau Penghentian Kontrak. 1.13. **Lokasi Pekerjaan** adalah lokasi dimana Pekerjaan dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Pokok Ikatan Kerja dan/atau SSKIK. 1.14. **Laporan Kemajuan Pekerjaan** adalah laporan yang dibuat oleh PPP dan PENYEDIA yang menyatakan tingkat penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak pada saat dibuatnya laporan dimaksud. 1.15. **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak. 1.16. **PPP** atau **Pengawas Pelaksanaan Pekerjaan** adalah personel/Tim yang ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang, yang bertanggungjawab dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan.

Paraf	Perusahaan	Penyedia

Scanned by CamScanner

1.17. **PPIK** atau **Pengendali Pelaksana Ikatan Kerja** adalah personel yang ditetapkan oleh Pemimpin Unit Pengadaan/ Pejabat Unit ST satu tingkat di bawah Direktur/Pimpinan Kantor Cabang yang bertangggung jawab dalam pengendalian pelaksanaan Ikatan Kerja.

1.18. **Pekerjaan** adalah salah satu atau lebih penyediaan Barang dan/atau Jasa yang disediakan oleh PENYEDIA kepada PERUSAHAAN sebagaimana disepakati dalam Kontrak.

1.19. **PERUSAHAAN** adalah Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.

1.20. **PENYEDIA** adalah Pelaku usaha yang merupakan pihak penyedia Barang dan/atau Jasa yang melaksanakan Pekerjaan serta menandatangani Kontrak.

1.21. **Pejabat Yang Berwenang** adalah pejabat PERUSAHAAN yang memiliki kewenangan mengadakan Kontrak dengan PENYEDIA sesuai dengan batas anggaran yang ditetapkan oleh PERUSAHAAN.

1.22. **Pokok Ikatan Kerja** adalah bagian dan satu kesatuan dari Kontrak yang berisi hal-hal utama yang disepakati oleh PERUSAHAAN dan PENYEDIA.

1.23. **Surat Usulan Perubahan Pekerjaan** adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengawas Pelaksanaan Pekerjaan (PPP) dan PENYEDIA, sebagai usulan perubahan Kontrak kepada Pejabat Yang Berwenang yang disampaikan melalui PPIK.

1.24. **SSUIK** adalah Syarat-Syarat Umum Ikatan Kerja.

1.25. **SSKIK** adalah Syarat-Syarat Khusus Ikatan Kerja.

1.26. **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal mulai Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan oleh PENYEDIA yang dinyatakan dalam SSKIK.

1.27. **Tanggal Penyelesaian Pekerjaan** adalah tanggal penyerahan seluruh Pekerjaan (100%) sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.

Paraf	Perusahaan	Penyedia

Scanned by CamScanner

	1.28. **Unit ST** atau **Unit Spesifikasi Teknis** adalah unit kerja yang ditunjuk Direksi untuk mempertimbangkan dan menentukan spesifikasi teknis pekerjaan yang diperlukan PERUSAHAAN dan data lain yang dipandang perlu berikut alternatifnya sesuai dengan kebutuhan Unit Pemakai.
2. Penerapan	SSUIK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan lain dalam Dokumen Kontrak yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak. Ketentuan dalam SSUIK dapat dikecualikan sepanjang disepakati secara tertulis oleh PERUSAHAAN dan PENYEDIA sebagaimana dituangkan dalam SSKIK dan/atau Pokok Ikatan Kerja atau dokumen lainnya yang dibuat kemudian hari oleh PERUSAHAAN dan PENYEDIA.
3. Bahasa dan Hukum	3.1. Bahasa yang dipergunakan dalam Kontrak ini adalah Bahasa Indonesia. 3.2. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
4. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan	4.1. Penyelenggaraan Pengadaan dan Pekerjaan harus mematuhi etika sebagai berikut: a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan; b. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pemilihan yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan; c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat; d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak; e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan (*conflict of interest*);

Paraf	Perusahaan	Penyedia

Scanned by CamScanner

	f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan PERUSAHAAN dalam Pengadaan; g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan PERUSAHAAN; h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan. 4.2. PENYEDIA menjamin bahwa yang bersangkutan dan Subpenyedia (jika ada) bersedia mengikuti ketentuan pada butir 4.1. 4.3. PENYEDIA yang menurut penilaian Pejabat Yang Berwenang terbukti melanggar ketentuan di atas dapat dikenakan sanksi sebagai berikut: a. pemutusan Kontrak; b. dimasukkan dalam daftar hitam selama 2 (dua) Tahun; dan c. Tuntutan ganti rugi dalam hal terdapat kerugian PERUSAHAAN.
5. Korespondensi	5.1. Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKIK. 5.2. Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKIK. Jika disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKIK.
6. Wakil Sah Para Pihak	Adalah Pejabat Yang Berwenang yang mewakili PERUSAHAAN atau PENYEDIA yang disebutkan dalam SSKIK yang diperbolehkan melakukan suatu tindakan-tindakan yang disyaratkan berdasarkan Kontrak ini.

Paraf	Perusahaan	Penyedia

Scanned by CamScanner

	Perubahan atas Wakil Yang Sah para pihak disampaikan secara tertulis kepada masing-masing Pihak melalui alamat Korespondensi sebagaimana dimaksud dalam butir 6 di atas.
7. Pembukuan	PENYEDIA diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
8. Perpajakan	8.1. PENYEDIA, Subpenyedia (jika ada), dan Personel Inti yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak (terkecuali ditentukan lain dalam SSUIK atau Pokok Ikatan Kerja). 8.2. Pajak Penghasilan (PPh) dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk seluruh biaya Pekerjaan menjadi tanggungan PENYEDIA sesuai peraturan perundang-undangan dibayarkan melalui PERUSAHAAN sebagai wajib pungut, dipotong langsung dari nilai pembayaran dan selanjutnya PERUSAHAAN akan memberikan bukti pemotongan pajak tersebut kepada PENYEDIA.
9. Pengalihan Pekerjaan dan/atau Subkontrak	9.1. Pengalihan seluruh atau sebagian Pekerjaan dari Kontrak tidak dapat dilakukan kecuali dengan persetujuan PERUSAHAAN. 9.2. PENYEDIA hanya dapat mengalihkan/mensubkontrakkan sebagian Pekerjaan Utama kepada PENYEDIA spesialis dengan persetujuan tertulis Pejabat Yang Berwenang. PENYEDIA tetap bertanggung jawab atas bagian Pekerjaan yang dialihkan/ disubkontrakkan tersebut. 9.3. Jika ketentuan di atas dilanggar, maka Kontrak dapat diputuskan secara sepihak oleh PERUSAHAAN dan PENYEDIA dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Kontrak.
10. Pengabaian	Jika terjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan Kontrak atau pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan lain oleh salah satu Pihak, maka pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah dari Pihak yang dirugikan.

Paraf	Perusahaan	Penyedia

Scanned by CamScanner

B. PELAKSANAAN, PERUBAHAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK	
B.1 Pelaksanaan Pekerjaan	
11. Pengawas Pelaksanaan Pekerjaan	11.1. PPP melakukan pengawasan kemajuan pekerjaan/progress fisik, ketepatan lingkup, waktu dan biaya pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak. 11.2. PPP membuat dan menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan secara periodik untuk disampaikan kepada PPIK dan Pejabat Yang Berwenang. 11.3. PPP membuat dan menandatangani Surat Usulan Perubahan Pekerjaan bersama PENYEDIA untuk disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang melalui PPIK. 11.4. PPP melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dengan PENYEDIA dimulai sejak tahap persiapan pelaksanaan pekerjaan hingga pekerjaan mencapai 100% (seratus perseratus) berdasarkan Kontrak. 11.5. PPP dapat menunjuk Pengawas Lapangan dan/atau Pengawas Harian sesuai dengan kebutuhan.
12. Pengendali Pelaksana Ikatan Kerja	12.1. PPIK melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap Laporan Kemajuan Pekerjaan yang disampaikan oleh PPP. 12.2. Pengendalian pelaksanaan Kontrak yang dilakukan PPIK untuk memastikan pelaksanaan Kontrak telah diselesaikan secara tepat lingkup pekerjaan (on scope), tepat waktu (on time) dan tepat anggaran (on budget). 12.3. PPIK melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap Surat Usulan Perubahan Pekerjaan yang disampaikan oleh PPP. 12.4. PPIK mengusulkan penerbitan Surat Peringatan dan penetapan Ikatan Kerja Kritis kepada Pejabat Yang Berwenang. 12.5. PPIK melakukan penanganan Ikatan Kerja Kritis.

Paraf	Perusahaan	Penyedia

Scanned by CamScanner

	12.6. PPIK mengusulkan pengenaan sanksi kepada PENYEDIA yang melakukan pelanggaran dalam proses pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Yang Berwenang.
13. Perintah	PENYEDIA berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah PPP yang sesuai dengan kewenangan PPP dalam Kontrak ini.
14. Akses ke Lokasi Pekerjaan	PENYEDIA berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat Yang Berwenang dan/atau Wakil Sah Pejabat Yang Berwenang ke Lokasi Pekerjaan dan lokasi lainnya dimana Pekerjaan ini sedang dilaksanakan.
15. Penyelesaian Pekerjaan	15.1. PENYEDIA melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan dalam jangka waktu berlakunya Kontrak, yang dibuktikan dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan 100% (seratus perseratus) yang ditandatangani oleh PPP dan PENYEDIA. 15.2. Dalam penyelesaian Pekerjaan, PPP memastikan seluruh Ruang Lingkup Pekerjaan telah dilaksanakan oleh PENYEDIA. 15.3. Dalam hal oleh sebab apapun PENYEDIA mengajukan permohonan untuk perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, maka PPP melakukan analisa antara lain terhadap: a. Urgensi dan tingkat prioritas dari Pekerjaan tersebut; b. Penyebab terjadinya keterlambatan; dan c. Justifikasi/pertimbangan-pertimbangan yang mendasari usulan perpanjangan penyelesaian Pekerjaan. 15.4. Hasil analisa tersebut pada butir 15.3. dituangkan dalam Surat Usulan Perubahan Pekerjaan yang ditandatangani oleh PPP dan PENYEDIA sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan untuk diusulkan kepada Pejabat Yang Berwenang melalui PPIK. 15.5. Pejabat Yang Berwenang bersama dengan Unit ST melakukan Verifikasi dan/atau klarifikasi Surat Usulan Perubahan Pekerjaan, termasuk menentukan estimasi waktu perpanjangan penyelesaian Pekerjaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Perubahan Pekerjaan yang

Paraf	Perusahaan	Penyedia

Scanned by CamScanner

	ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang dengan PENYEDIA. 15.6. Dalam hal Pejabat Yang Berwenang dan Unit ST menyetujui usulan perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan tersebut, maka Pejabat Yang Berwenang melakukan perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dengan meminta surat kesanggupan penyelesaian Pekerjaan, dengan ketentuan: a. Dalam hal keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan PENYEDIA, maka kepada PENYEDIA diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dalam masa keterlambatan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam Kontrak; atau b. Dalam hal keterlambatan tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan PENYEDIA, maka dilakukan perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, tanpa dikenakan sanksi denda keterlambatan. 15.7. Dalam hal Pejabat Yang Berwenang dan Unit ST tidak menyetujui usulan perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pekerjaan tersebut, maka Pejabat Yang Berwenang melakukan Pemutusan Kontrak. 15.8. Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dan pengenaan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam butir 15.6 dinyatakan dalam Addendum Kontrak sebagaimana diatur pada ketentuan Perubahan Kontrak.
16. Perubahan Kontrak	16.1. Perubahan Kontrak dapat dilakukan dalam hal terjadi sebagai berikut: a. Sebagian dari Dokumen Teknis yang merupakan bagian dari Kontrak tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kondisi lapangan; b. Keadaan yang tidak diperkirakan sebelumnya oleh Para Pihak dalam Kontrak (*unforeseen condition*); c. Pengukuran akhir terhadap hasil Pekerjaan PENYEDIA dalam Kontrak dengan cara pembayaran Harga Satuan atau bagian Harga Satuan dari Kontrak Gabungan; d. Kesalahan administratif; e. Keterlambatan penyelesaian Pekerjaan atau keterlambatan penyelesaian pemeliharaan;

Paraf	Perusahaan	Penyedia

Scanned by CamScanner

f. Keadaan Kahar; dan/atau
g. Adanya perubahan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16.2. Perubahan Kontrak dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Pengadaan, dalam bentuk:
a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
b. Menambah dan/atau mengurangi jenis/lingkup Pekerjaan;
c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;
d. Mengubah jangka waktu di dalam Kontrak;
e. Mengubah Nilai Kontrak, termasuk akibat Penyesuaian Harga; dan/atau
f. Melakukan perubahan administratif.

16.3. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir 16.2 huruf a, b dan c di atas harus tetap mengacu pada KAK/RKST Pengadaan yang telah ditetapkan.

16.4. Dalam rangka Perubahan Kontrak:
a. PPP dan PENYEDIA membuat Surat Usulan Perubahan Pekerjaan yang memuat justifikasi perubahan Pekerjaan untuk diusulkan kepada Pejabat Yang Berwenang melalui PPIK;
b. Pejabat Yang Berwenang bersama dengan Unit ST melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi Surat Usulan Perubahan Pekerjaan, termasuk dalam hal dibutuhkan melakukan negosiasi teknis dan harga kepada PENYEDIA dibantu oleh Panitia/Pejabat Pengadaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Perubahan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang dengan PENYEDIA;
c. Dalam hal terjadi perubahan volume atas pekerjaan/barang yang tercantum dalam daftar Harga Satuan Timpang, maka harga satuan yang digunakan adalah harga satuan pada HPS;
d. Dalam hal terjadi perubahan volume atas pekerjaan/barang yang termasuk dalam daftar Harga Satuan Tidak Wajar, maka harga satuan yang digunakan adalah:
(i) harga satuan terendah, dalam hal harga satuan terendah kurang dari atau sama dengan harga satuan pada HPS; atau

Paraf	Perusahaan	Penyedia

Scanned by CamScanner

	(ii) harga satuan pada HPS, dalam hal harga satuan terendah lebih tinggi dari harga satuan pada HPS. e. Dalam hal perubahan Kontrak mengakibatkan penambahan Nilai Kontrak, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: (i) Penambahan nilai Kontrak dimaksud tidak boleh melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari nilai Kontrak awal; dan (ii) Tersedia anggaran PERUSAHAAN untuk pekerjaan tambah. f. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e tidak berlaku terhadap perubahan Nilai Kontrak yang diakibatkan oleh: (i) Penyesuaian harga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direksi PERUSAHAAN; atau (ii) Penyesuaian Harga Satuan sebagai pelaksanaan dari kebijakan Pemerintah. 16.5. Perubahan Kontrak dilaksanakan dalam bentuk Addendum Kontrak, yang ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang dan PENYEDIA berdasarkan Berita Acara Perubahan Pekerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Berita Acara Perubahan Pekerjaan dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan atau hari akhir penyerahan Pekerjaan. 16.6. Pelaksanaan perubahan Pekerjaan dimulai setelah penandatanganan addendum Kontrak atau tanggal lain sebagaimana disepakati dalam Addendum Kontrak.
B.2 Keadaan Kahar	
17. Keadaan Kahar	17.1. Keadaan Kahar adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Para Pihak dalam Kontrak, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak sehingga diperlukan perubahan Kontrak atau Penghentian Kontrak. 17.2. Yang temasuk Keadaan Kahar sebagaimana ditentukan dalam Kontrak, termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. bencana alam; b. bencana non alam; c. bencana sosial;

Paraf	Perusahaan	Penyedia

Scanned by CamScanner

d. pemogokan;
e. kebakaran;
f. sabotase;
g. huru-hara;
h. Peperangan;
i. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Teknis terkait; dan/atau
j. Terdapat Peraturan Perundangan atau keputusan pemerintah/instansi yang berwenang yang menyatakan Kontrak tidak dapat dilanjutkan

Yang tidak termasuk sebagai penyebab keadaan Kahar adalah petir/halilintar/*lightning strike.*

17.3. Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka PENYEDIA memberitahukan kepada Pejabat Yang Berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari Pejabat Instansi Yang Berwenang, sesuai ketentuan perundang-undangan.

17.4. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

17.5. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.

17.6. Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, PENYEDIA tidak berhak menerima pembayaran. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Yang Berwenang memerintahkan secara tertulis kepada PENYEDIA untuk meneruskan pekerjaan, maka PENYEDIA berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak. Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan akibat keadaan Kahar diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum Kontrak.

B.3 Penghentian, Pemutusan dan Wanprestasi, Pembatalan dan Pengakhiran Kontrak

Paraf	Perusahaan	Penyedia

Scanned by CamScanner

18. Penghentian Kontrak	18.1.	Penghentian Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Yang Berwenang dalam hal terdapat perubahan kondisi lapangan atau kebijkan pemerintah yang berdampak pada Kontrak, dan/atau dalam hal terjadi Keadaan Kahar.
	18.2.	Penghentian kontrak karena Kedaan Kahar dapat bersifat: a. Penghentian Sementara; atau b. Penghentian Tetap.
	18.3.	Dalam hal dilakukan Penghentian Sementara tidak dikenakan sanksi atau Denda keterlambatan.
	18.4.	Dalam hal Penghentian Tetap, pembayaran kepada PENYEDIA dapat dilakukan setelah dilakukan penilaian terhadap hasil Pekerjaan yang dapat dimanfaatkan oleh PERUSAHAAN. Penilaian sebagaimana dimaksud di atas dapat melibatkan pihak independen atau penilai (*appraisal*)
19. Pemutusan Kontrak dan Wanprestasi	19.1.	Pejabat Yang Berwenang melakukan Pemutusan Kontrak dalam hal: a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda; b. PENYEDIA menarik diri atau tidak sanggup melaksanakaan Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak; c. PENYEDIA menyampaikan keterangan/data yang tidak benar dalam pelaksanaan Kontrak atau menyampaikan dokumen palsu dalam pelaksanaan Kontrak; d. PENYEDIA terlibat dalam praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan Kontrak setelah diputuskan oleh Instansi Yang Berwenang; e. PENYEDIA dinyatakan pailit berdasarkan keputusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap; dan/atau f. Izin Usaha PENYEDIA telah dicabut oleh Pemerintah/Instansi yang berwenang.
	19.2.	Pejabat Yang Berwenang dapat melakukan Pemutusan Kontrak dalam hal: a. PENYEDIA cidera janji (wanprestasi) terhadap kesepakatan yang tertuang dalam syarat dan ketentuan Kontrak; b. PENYEDIA gagal menyerahkan hasil pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan yang

Paraf	Perusahaan	Penyedia

Scanned by CamScanner

	ditentukan dalam Kontrak dan Pejabat Yang Berwenang tidak memberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dalam masa keterlambatan; c. PENYEDIA gagal memenuhi mutu hasil pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan operasional yang dipersyaratkan PERUSAHAAN; d. PENYEDIA mengalihkan Kontrak kepada pihak lain; e. PENYEDIA mengalihkan sebagian pekerjaan tanpa ijin dari Pejabat Yang Berwenang; f. PENYEDIA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau g. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. 19.3. Besarnya kerugian PERUSAHAAN akibat pemutusan Kontrak ditentukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan Kontrak. 19.4. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, pembayaran kepada PENYEDIA dapat dilakukan setelah adanya penilaian terhadap hasil pekerjaan yang dapat dimanfaatkan oleh PERUSAHAAN. Penilaian sebagaimana dimaksud di atas dapat melibatkan pihak independen atau ahli penilai (*appraisal*). 19.5. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan PENYEDIA : a. Tuntutan ganti rugi dalam hal terdapat kerugian PERUSAHAAN; dan b. PENYEDIA dimasukkan dalam Daftar Hitam.
20. Pembatalan Kontrak	20.1. Pembatalan Kontrak dilakukan oleh Pejabat Yang Berwenang berdasarkan hasil audit internal PERUSAHAAN dan/atau pemeriksaan oleh pihak lain, dengan temuan sebagai berikut: a. PENYEDIA menyampaikan keterangan/data yang tidak benar dalam proses Pemilihan atau menyampaikan dokumen palsu dalam proses Pemilihan; b. Ditemukan persekongkolan untuk mengatur harga penawaran dalam proses Pemilihan yang melibatkan PENYEDIA; atau

Paraf	Perusahaan	Penyedia

Scanned by CamScanner

	e. Adanya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses Pemilihan yang melibatkan PENYEDIA setelah diputuskan oleh Instansi Yang Berwenang. 20.2. Dalam hal terjadi Pembatalan Kontrak, pembayaran kepada PENYEDIA dapat dilakukan setelah adanya penilaian terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PENYEDIA terhadap hasil pekerjaan yang dapat dimanfaatkan oleh PERUSAHAAN. Penilaian sebagaimana dimaksud di atas dapat melibatkan pihak independen atau ahli penilai (*appraisal*).
21. Pengakhiran Kontrak	Kontrak dinyatakan berakhir apabila: a. Masa Kontrak telah berakhir; b. Telah dipenuhinya kewajiban oleh kedua belah pihak; c. Telah dilakukan pemutusan Kontrak; d. Telah dilakukan pembatalan Kontrak; atau e. Telah dilakukan penghentian Kontrak secara tetap. Para Pihak dengan ini menyatakan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam setiap Pengakhiran Kontrak.
C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA	
22. Umum	22.1. PENYEDIA secara umum memiliki hak dan kewajiban: a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Nilai Kontrak yang telah ditentukan dalam Kontrak; b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Yang Berwenang untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPP; d. melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan Lingkup Pekerjaan dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, alat kerja, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk

Paraf	Perusahaan	Penyedia

Scanned by CamScanner

	pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak; f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan Pekerjaan yang dilakukan PPP dan/atau Pejabat Yang Berwenang; g. menyerahkan hasil Pekerjaan sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan PENYEDIA; i. bertanggung jawab atas kewajaran harga yang tertuang dalam Kontrak dan bersedia untuk mengembalikan nilai tertentu apabila dibuktikan terdapat kemahalan harga yang mengakibatkan kerugian Negara; dan j. bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen yang diserahkan kepada PERUSAHAAN. 22.2. PENYEDIA dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas PENYEDIA.
23. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi	PENYEDIA dilarang menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, seperti dan tidak terbatas pada spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari Pejabat Yang Berwenang.
24. Hak Atas Kekayaan Intelektual	PENYEDIA wajib melindungi PERUSAHAAN dan Pejabat Yang Berwenang dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh PENYEDIA.
25. Kewajiban Pertanggungan dan Risiko	25.1. PENYEDIA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PERUSAHAAN terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PERUSAHAAN (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat

Paraf	Perusahaan	Penyedia

Scanned by CamScanner

	PERUSAHAAN) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan berakhrinya Masa Kontrak: a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda PENYEDIA, Subpenyedia (jika ada), dan personel; b. cidera tubuh, sakit atau kematian personel; dan c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga. 25.2. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh PENYEDIA tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam butir 25 ini. 25.3. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh PENYEDIA atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian PENYEDIA.
26. Perlindngan Tenaga Kerja	26.1. PENYEDIA dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personelnya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 26.2. PENYEDIA berkewajiban memerintahkan Personelnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja pada waktu pelaksanaan Pekerjaan, PENYEDIA beserta Personelnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut. 26.3. PENYEDIA berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personelnya (termasuk Personel Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai. 26.4. Tanpa mengurangi kewajiban PENYEDIA untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, PENYEDIA akan melaporkan kepada Pejabat Yang Berwenang mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

Paraf

Perusahaan	Penyedia

Scanned by CamScanner

27. Asuransi	27.1. Apabila disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau Dokumen Penawaran, maka PENYEDIA wajib menyediakan asuransi sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya Masa Pemeliharaan. 27.2. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Nilai Kontrak.
28. Tindakan PENYEDIA yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Yang Berwenang	PENYEDIA berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Yang Berwenang sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; b. menunjuk Personel Inti yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran Kontrak; c. mengubah Personel Inti dan/atau alat kerja d. mengubah atau memutakhirkan program mutu; dan e. tindakan lain yang diatur dalam SSKIK.
29. Penyedia Lain	PENYEDIA berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan Lokasi Pekerjaan bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya yang berkepentingan atas Lokasi Pekerjaan. Jika dipandang perlu, Pejabat Yang Berwenang dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di Lokasi Pekerjaan.
30. Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja	PENYEDIA bertanggung jawab atas keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja semua pihak di Lokasi Pekerjaan.
31. Denda dan Ganti Rugi	31.1. PENYEDIA berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban PENYEDIA dalam Kontrak ini. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual PENYEDIA. 31.2. Denda keterlambatan dikenakan berdasarkan : a. Nilai Kontrak, untuk pembayaran Lumsum atau bagian dari Lumsum; atau b. Nilai Kontrak yang belum diselesaikan, untuk pembayaran Harga Satuan atau bagian harga satuan. Nilai Kontrak atau bagian dari Nilai Kontrak sebagimana mana dimaksud a dan b di atas adalah nilai sebelum PPN

Paraf

Perusahaan	Penyedia

Scanned by CamScanner

	31.3. Besaran Denda adalah sebagaimana ditentukan dalam butir 36.6 SSUIK ini. 31.4. PENYEDIA berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa ganti rugi karena terjadinya cidera janji/wanprestasi, termasuk tetapi tidak terbatas dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalain PENYEDIA maka seluruh biaya tambahan yang menjadi beban PERUSAHAAN wajib ditanggung secara langsung oleh PENYEDIA, termasuk biaya pihak ketiga lain. Atas biaya tersebut PERUSAHAAN berhak melakukan pemotongan atas setiap tagihan Peyedia sejumlah klaim yang diajukan oleh pihak ketiga lain tersebut. 31.5. Dalam hal terjadi perbedaan harga material/bahan import dengan harga pada komponen harga satuan dalam Kontrak dan Dokumen Penawaran, maka beban dan tanggung jawab atas hal tersebut, termasuk dan tidak terbatas pada biaya dan pajak yang timbul atas perbedaan tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab PENYEDIA.
D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG	
32. Fasilitas	Pejabat Yang Berwenang dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKIK.
E. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA	
33. Nilai Kontrak	Pejabat Yang Berwenang membayar kepada PENYEDIA atas pelaksanaan Pekerjaan sebesar Nilai Kontrak.
34. Cara Pembayaran	34.1. Cara Pembayaran atas setiap Nilai Kontrak adalah sebagaimana disepakati dalam SSKIK. 34.2. Surat Penagihan (Invoice) harus dilampiri dokumen-dokumen pembayaran sebagaimana disebutkan dalam SSKIK. 34.3. Permintaan pembayaran harus diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak

Paraf	Perusahaan	Penyedia

Scanned by CamScanner

	tanggal Laporan Kemajuan Pekerjaan/BAST I/BAST II dengan ketentuan tidak melebihi akhir masa pajak sesuai tanggal Laporan Kemajuan Pekerjaan BAST I/BAST II. 34.4. Untuk suatu pembayaran tahapan, maka setiap pembayaran terakhir wajib segera diproses penagihannya oleh PENYEDIA, dan apabila tidak diproses penagihannya, maka PERUSAHAAN akan memberitahukan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu antara masing-masing pemberitahuan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender. 34.5. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya pemberitahuan terakhir ternyata PENYEDIA tidak juga memproses penagihan pembayaran tahap terakhir dimaksud, maka terhitung sejak tanggal yang ditetapkan tersebut PENYEDIA berdasarkan Kontrak ini memberikan kuasa kepada PERUSAHAAN dengan hak substitusi untuk tidak lagi memproses pembayaran terkahir dimaksud kepada PENYEDIA, dan dengan demikian pembayaran terakhir tersebut menjadi milik PERUSAHAAN. 34.6. PERUSAHAAN melakukan pembayaran kepada PENYEDIA paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Dokumen Pembayaran oleh Direktorat Keuangan PERUSAHAAN dengan baik dan benar.
35. Penangguhan Pembayaran	35.1. Pejabat Yang Berwenang dapat menangguhkan pembayaran Pekerjaan jika PENYEDIA belum memenuhi kewajibannya dalam Kontrak. 35.2. Pejabat Yang Berwenang secara tertulis memberitahukan kepada PENYEDIA tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. PENYEDIA diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. 35.3. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian PENYEDIA. 35.4. Jika dipandang perlu oleh Pejabat Yang Berwenang, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada PENYEDIA.

Paraf	Perusahaan	Penyedia

Scanned by CamScanner

F. SANKSI dan PENYELESAIAN PERSELISIHAN	
36. Sanksi	36.1. PENYEDIA yang memalsukan dokumen atau menyampaikan keterangan/data yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan, terindikasi melakukan persekongkolan dengan PENYEDIA lainnya untuk mengatur penawaran, atau melakukan KKN dalam pemilihan, dikenakan sanksi sebagai berikut : a. Pencantuman dalam Daftar Hitam selama 2 (dua) Tahun; dan b. Tuntutan ganti rugi dalam hal terdapat kerugian PERUSAHAAN. 36.2. PENYEDIA yang dikenakan Pemutusan Kontrak dikenakan Sanksi: a. Pencantuman dalam Daftar Hitam selama 2 (dua) Tahun; dan b. Tuntutan ganti rugi dalam hal terdapat kerugian PERUSAHAAN. 36.3. PENYEDIA yang dikenakan pembatalan Kontrak dan tidak menyelesaikan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Kontrak, dikenakan Sanksi: a. Pencantuman dalam Daftar Hitam selama 2 (dua) Tahun; dan b. Tuntutan ganti rugi dalam hal terdapat kerugian PERUSAHAAN. 36.4. PENYEDIA yang tidak melaksanakan perbaikan atas barang bergaransi dalam Masa Pemeliharaan dan/atau masa Garansi dikenakan Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam selama 1 (satu) Tahun. 36.5. PENYEDIA dikenakan Sanksi berupa ganti rugi sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan dalam hal : a. Menyebabkan timbulnya biaya tambahan pada pihak lain. b. Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume berdasarkan hasil audit; dan/ atau c. Menyerahkan Barang/Jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak berdasarkan hasil audit.

Paraf	Perusahaan	Penyedia

Scanned by CamScanner

	36.6. PENYEDIA yang terlambat menyelesaikan pekerjaan atau pemeliharaan berdasarkan Kontrak, dikenakan sanksi denda sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai Kontrak (kontrak lumsum) atau bagian Nilai Kontrak yang belum diselesaikan (kontrak harga satuan) untuk setiap hari keterlambatan. Nilai Kontrak atau bagian dari Nilai Kontrak adalah nilai sebelum PPN. 36.7. PENYEDIA yang terlambat menyerahkan permintaan pembayaran dan Faktur Pajak, dikenakan Sanksi denda pajak sebesar sanksi yang dikenakan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada PERUSAHAAN. 36.8. Wakil PENYEDIA dikenakan Sanksi pencatuman dalam Daftar Hitam dengan ketentuan dan jangka waktu yang sama dengan sanksi bagi PENYEDIA/Kemitraan yang diwakilinya.
37. Penyelesaian Perselisihan	37.1. Dalam hal terjadi perselisihan antara PERUSAHAAN dan PENYEDIA yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak, kedua belah pihak terlebih dahulu berupaya sungguh-sungguh untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat, termasuk melalui lembaga penyelesaian sengketa Kontrak yang terkait dengan Pekerjaan; 37.2. Dalam hal PERUSAHAAN dan PENYEDIA tidak mencapai kesepakatan atau kata mufakat, maka setiap dan seluruh perselisihan tersebut diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Tangerang.

Paraf	Perusahaan	Penyedia

Scanned by CamScanner